

Rindu Komnas HAM Zaman Orde Baru



SUKSESI komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus menjadi momentum untuk merevitalisasi peran lembaga ini sesuai dengan amanat reformasi. Jangan sampai lembaga ini berlarut-larut terdelegitimasi karena minim peran dalam penegakan HAM di negeri ini.

Pemilihan komisioner yang punya kapasitas, integritas, dan independensi kuat menjadi langkah satu-satunya untuk mengangkat kembali mu-
DUTA

DUTA

ruah lembaga ini. Komisioner periode sekarang ditengarai gagal menjalankan mandat. Hal itu disimpulkan dari hasil kajian evaluasi Komnas HAM periode 2012-2017 yang disusun Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM.

Sejumlah indikasi pelanggaran mewarnai kinerja mereka, di antaranya dugaan korupsi anggaran dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Mei 2016, kegagalan penanganan kasus dan penyelidikan Komnas HAM, lemahnya kinerja, tak maksimalnya pelapor khusus HAM, serta pembiaran terhadap aktor pelanggaran HAM untuk menduduki jabatan publik.

Selain itu, independensi, kapasitas, dan kredibilitas komisioner Komnas HAM periode sekarang menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi urusan organisasi di internal membuat Komnas HAM jatuh dalam urusan perebutan jabatan dengan perubahan tata tertib sehingga masa jabatan pimpinan Komnas HAM yang semula 2 tahun 6 bulan diubah menjadi 1 tahun.

Jelas kondisi ini memengaruhi efektivitas Komnas HAM. Bukannya menunjukkan perbaikan, kinerja Komnas HAM dari periode ke periode justru mengalami penurunan. Di sinilah Panitia Seleksi Komisioner Komnas HAM dituntut untuk cermat, bagaimana menyeleksi kandidat yang benar-benar berintegritas dan independen.

Pemulihan wibawa lembaga juga harus dipertimbangkan dalam proses seleksi supaya Komnas HAM kembali dipercaya masyarakat. Ke depan perlu Komnas HAM yang memiliki visi baru, soliditas kuat di antara komisioner. Setiap kebijakan yang akan diputuskan harus berdasarkan kesepahaman semua komisioner.

Di pundak Jimly Asshiddiqie bersama anggota panel lainnya itulah tanggung jawab tersebut dipang- gul. Tidak berat karena panel menerima berjibun masukan yang mengalir dari publik tentang rekam jejak para kandidat. Akan tetapi, tidak mudah juga karena butuh keberanian untuk tegas tidak meloloskan kandidat yang tidak memenuhi syarat independen, berintegritas, dan punya kapabilitas.

Berdasarkan penelusuran Koalisi Selamatkan Komnas HAM, 13 kandidat komisioner ditengarai punya afiliasi dengan partai politik. Sejumlah 13 calon komisioner terafiliasi dengan kepentingan bisnis dan korporasi.

Yang barangkali paling mencemaskan, 9 calon komisioner terkait dengan kelompok radikal. Termasuk dugaan minimnya integritas sejumlah calon karena pernah terkait dalam korupsi dan gratifikasi.

Panel memang bukan penentu akhir komisioner terpilih karena dari 14 orang yang dipilih panel, nantinya akan ditentukan DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sehingga terpilih tujuh komisioner. Namun, jika panel sejak awal mengeliminasi kandidat-kandidat yang minim independensi dan kompetensi, DPR akan lebih mudah memproses mekanisme politiknya.

Publik tentu rindu dengan peran vital Komnas HAM di masa awal pembentukannya di masa Orde Baru. Di masa kepemimpinan Ali Said, Baharuddin Lopa, dan Asmara Nababan, Komnas HAM berani membuat terobosan meskipun rezim represif. Komnas HAM pada saat itu secara langsung mencari fakta ke lapangan, mengumumkan hasil investigasi mereka, dan memberikan rekomendasi.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediaindonesia.com dan
www.metrotvnews.com

Simak tayangannya di:
www.mediaindonesia.com/editorials



Pansel Pastikan Komisioner tidak Terkait Parpol

MEDIA INDU, 4/7/17 (2)

KETUA Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Ashiddiqie mengungkapkan pihaknya telah menyaring 28 orang dari 60 orang calon komisioner Komnas HAM. Dari penyaringan itu, pansel meyakini tidak ada lagi calon yang terafiliasi dengan partai politik ataupun organisasi yang tidak cocok dengan Komnas HAM.

Calon-calon yang bermasalah jangan sampai lolos sehingga tidak menyebabkan perdebatan.

Hal itu dikemukakan Jimly kepada *Media Indonesia* saat dihubungi, kemarin. Para calon terpilih itu diumumkan hari ini.

Jimly menyatakan para calon yang memiliki afiliasi dengan partai politik atau korporasi ataupun organisasi yang tidak sesuai dengan Komnas HAM tentu akan memengaruhi independensi. Pemilihan ke-28 calon itu sudah mempertimbangkan hal tersebut, sesuai masukan masyarakat juga berbagai organisasi lainnya.

"Kami bersyukur ada masukan dari masyarakat, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Walaupun ada yang

masih bisa ditoleransi, kita akan klarifikasi nanti melalui wawancara," jelas Jimly.

Ke-28 calon akan diwawancara pada 19-21 Juli. Dari tahap wawancara tersebut dipilih 14 orang untuk selanjutnya diserahkan ke DPR.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai hasil seleksi komisioner Komnas HAM menjadi pertarungan integritas pansel. Dengan demikian, tidak menjadi perdebatan di tengah masyarakat luas.

Jimly dan kawan-kawan harus mampu melahirkan calon-calon komisioner yang sudah steril dari beragam persoalan integritas para calon. Ramses berharap calon-calon yang bermasalah jangan sampai lolos, baik yang terkait dengan ormas radikal, kekerasan seksual, dugaan masalah korupsi, gratifikasi, maupun persoalan integritas lainnya.

Pada Minggu (2/7) Koalisi Selamatkan Komnas HAM mengungkapkan dari 60 calon komisioner HAM terdapat 5 orang diduga terdapat korupsi dan gratifikasi, 11 orang bermasalah dalam hal kejujuran, 8 terkait kekerasan seksual, 14 bermasalah dalam isu keberagaman, dan 9 orang terindikasi berafiliasi dengan ormas radikal.

Sementara itu, dari aspek independensi, diketahui 13 orang berafiliasi dengan partai politik dan 13 orang berafiliasi dengan korporasi. (Dro/P-1)